CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dibidang keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang disyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

d. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

e. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

i. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun;

j. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakkan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

III. Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.
- I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- II. Landasan Hukum.
- III. Sistimatika Penulisan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD
- I. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD.
- II. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB III : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN OPD.
- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- B. Laporan Operasional (LO).
- C. Neraca.
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN OPD.

BAB V : PENUTUP.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2022, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Nomor : 913/B.1/2.17.2.07.3.32.01.0000/001/2022, tanggal 15 Nopember 2022 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

A. Pendapatan

Target Pendapatan untuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.350.200.000,-

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan terealisir sebesar *Rp.214,005,200,-* atau 61,11% dari target yang ditetapkan sebesar *Rp.350.200.000,-*. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan daerah dimana banyak kegiatan yang dipangkas serta berkurangnya kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Jenis dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah terealisiir sebesar *Rp. 214.005.200,-* atau 61,11% dari target yang ditetapkan sebesar *Rp.350.200.000,-* yang terdiri dari :

   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisir sebesar *Rp. 214.005.200,-* atau 61,11 % dari target yang ditetapkan sebesar *Rp.350.200.000,-* dengan rincian jenis pendapatan:

   a. Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis terealisir sebesar *Rp.76.150.000,-* atau 123.53% dari target yang ditetapkan sebesar *Rp.61.643.000,-*

b. Retribusi Penyewaan Bangunan terealisir sebesar *Rp.137.855.200,-* atau 47,77% dari target yang ditetapkan sebesar *Rp. 288.557.000,-*

Penjelasan atas Pendapatan akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB III tentang Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD.

B. **Belanja**

Rencana Belanja Daerah untuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD sebesar *Rp. 32.099.818.286,-* mengalami peningkatan pada perubahan APBD sebesar *Rp. 26.728.095.331,-* sehingga menjadi sebesar *Rp. 32.827.913.617,-*

Tahun Anggaran 2022 belanja yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Nomor : 913/B.1/2.17.2.07.3.32.01.0000/001/2022, tanggal 15 Nopember 2022 sesuai anggaran perubahan tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar *Rp. 32.827.913.617 dan terealisasi sebesar Rp. 26.310.872.086 ,-* atau 80,15 % yang terdiri dari :

Belanja Operasi sebesar *Rp.32.696.892.297,-* terealisasi sebesar *Rp.223.766.086,-* atau 80,20 % dan Belanja Modal sebesar *Rp. 131.021.320,-* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terealisir sebesar *Rp. 87.106.000,-* atau 66,48 % . jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 APBD sebesar *Rp. 32.751.118.752* mengalami kenaikan APBD pada tahun 2022 sebesar *Rp. 76.794.865 ,-* atau 0,23% sehingga menjadi *Rp. 32.827.913.617,-*

Keseluruhan belanja langsung di jabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI terealisir sebesar *Rp. 18.310.551.058,-* atau *77,43%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 23.648.333.647,-* terdiri dari :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dari Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah *Rp.239.760.987.* atau 62,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 385.505.307,-*

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Prangkat Daerah terealisir sebesar *Rp.15.628.402.755,- atau 75,6 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.20.670.355.600,-*

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisir sebesar *Rp. 17.698.900,-* atau 72,21% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.* 24.508.800*,-*

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisir sebesar 448.275.226,- atau *91,52%* dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 489.828.000,-*

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisir sebesar *Rp. 101.001.900,-* atau 70,05% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.* 144.189.400*,-*

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisir sebesar *Rp.1.734.974.830,-* atau 98,76% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.1.756.718.540,-*

g. Kegiatan Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisir sebesar Rp. 140.436.460,- atau 79,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.* 177.228.000*,-*

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

terealisir sebesar *Rp.120.969.100,-* atau 87,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.138.670.000*,- terdiri dari :

a. Kegiatan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah sebesar *Rp.120.969.100,-* atau 87,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.138.670.000*,-

3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

terealisir sebesar *Rp.106.162.840,-* atau 87,23% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.121.702.240,-* terdiri dari :

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota terealisir sebesar *Rp.21.716.900,-* atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.21.716.900,-*.
b. Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi terealisir sebesar *Rp.84.445.940,-* atau 84,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.99.985.340,-*
c. Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi terealisir sebesar *Rp.58.969.540,-* atau 79,44% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp.74.228.940,-*

4. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

   Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan terealisir sebesar Rp. 9.200.000 atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.200.000,-

5. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

   Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terealisir sebesar Rp. 4.149.909.448 atau 82,26% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.044.967.360,-

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

   Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan perjalanan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terealisir Rp.3.019.194.130,- atau 93,18% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.3.240.130.200,-

7. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi terealisir sebesar Rp.36.961.200 atau 87,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.42.197.500,-

8. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Penataan pesebaran produk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terealisir sebesar *Rp. 225.817.300,-* atau 98,11% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 230.157.800,-*

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan terealisir sebesar *Rp. 332.107.010,-* atau 94,20% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 352.554.870,-*

Catatan :

❖ Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 untuk komponen Belanja Langsung terdapat 09 (sembilan) Program dengan Tujuh belas (17) Kegiatan. Dari 09 (sembilan) Program tersebut terdapat 3 (tiga) urusan yakni urusan wajib, urusan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pilihan dengan uraian sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) didaerah provinsi

2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota.

b. Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Derah Provinsi.

3. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluai kinerja perangkat daerah

b. Administrasi keuangan perangkat daerah

c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

d. Administrasi umum perangkat daerah

e. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f. Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

3. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

a. Penerbit izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan, Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
   a. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
2. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
   a. Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
   a. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	OUT PUT
1.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
a.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di daerah Provinsi	- Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
a.	Pengesahan peraturan perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten	- Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota

3.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
a.	Penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan	- Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	_Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah
b.	Administrasi keuangan perangkat daerah	-Tersedianya dokumen Laporan Fisik dan keuangan -Terlaksananya pembayaran gaji PNS
c.	Administrasi Kepgawaian perangkat daerah	-Prosentase ketercapaian pelayaan administrasi perkantoran. -Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan kuangan
d,	Administrasi umum perangkat daerah	-terlaksanaya kegiatan rutin dinas -Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
e.	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Terlaksananya kegiatan rutin dinas -Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
f.	Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Terlaksannya kegiatan Rutin Dinas - Terpenuhinya kebutuhan Penyedia jasa keamanan kantor - Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
g.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-terlaksannnya kegiatan rutin dinas -Terlaksananya Honorarium Tenaga Honorer Sopir/Pengemudi (12 bulan)

		-Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (1 Tahun) -Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional (1 tahun)
5.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
a	Penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koprasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Koperasi aktif - Terlaksananya meningkatkan Akuntabilitas kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat - Terlatihnya 30 pengawas koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS di kabupaten Alor
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
a.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendapatan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	- Terlaksananya Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendapatan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
a.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	- Teridentifikasinya Calon Lokasi transmigrasi baru - Terlaksananya sosialisasi perwujudan kawasan dan penyiapan permukiman transmigrasi
8.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

a	Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-Terlaksananya pelaksanaan penataan pesebaran yang berasal dari lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Pengembangan satuan permukiman paa tahap pemantapan	-Terlaksananya pengembangan satuan permukiman pada tahap pemaantapan

II. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan

Secara umum penggunaan Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan satuan kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Namun terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, yakni adanya refoucusing anggaran sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan, terutama Program dan Kegiatan strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1 Pendapatan –LRA

Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT sebagai SKPD menganggarkan pendapatan daerah sesuai perubahan APBD 2022 sebesar Rp.350.200.000,- dan terealisir sebesar Rp. 214.005.200,- atau 61,11%.

3.1.2 Belanja

Rencana belanja untuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 34.039.818.286,- mengalami Penurunan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 1.211.904.669,- sehingga menjadi Rp.32.827.913.617,-. Dari Target Belanja Perubahan APBD sebesar Rp.32.827.913.617,- terealisir sebesar Rp.26.310.872.086,- atau 80,15 %. Jika dibandingkan dengan belanja di tahun 2021 sebelum perubahan APBD sebesar *Rp.* 29.328.744.069 mengalami kenaikan setelah mengalami perubahan APBD sebesar Rp. 32.785.932.504,- sehingga mengalami peningkatan sebesar *Rp.* 41.981.113,- atau 0,14 % dari realisasi Tahun Anggaran 2021.

. Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Belanja hibah dan belanja sosial.

Belanja operasi terealisir sebesar Rp. 26.223.766.086 ,-atau 80,20 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 32.696.892.297,-

- Belanja Pegawai terealisir sebesar Rp. 15.477.219.655,- atau 75,69 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.448.843.000,-
- Belanja Barang dan Jasa terealisir sebesar Rp. 8.021.546.431,- atau 90,51 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.863.049.297.,-

- Belanja Hibah terealisir sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 105.000.000.,-
- Belanja Bantuan Sosial terealisir sebesar Rp. 2.725.000.000,- atau 83,08 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.280.000.000.,-

b. Belanja modal terealisir sebesar Rp. 87.106.000 atau 66,48 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 131.021.320,-

B. Laporan Operasional

.

3.2.1 Pendapatan – LO

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT sebagai SKPD menganggarkan pendapatan retribusi daerah – LO sebesar Rp. 350.200.000,-terealisir sebesar Rp. 214.005.200,- atau 61,11%.

3.2.2 Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar, Realisasi Beban dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai merupakan, beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terealisir sebesar Rp. 15.477.219.655,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 20.833.071.890,- terjadi penurunan sebesar Rp. **5.355.852.235,- atau 25,70 %.**

2. Beban Barang dan Jasa

   Beban Barang dan Jasa adalah meliputi jasa konsultasi, listrik, telepon, air periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 yang terealisir sebesar Rp. 8.021.546.431,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.6.133.295.379,- terjadi kenaikan sebesar 1.888.251.052,- atau 23,53 %,-

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisir sebesar Rp. **1.060.094.258,98** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 908.874.451,91,- terjadi peningkatan sebesar Rp. **151.219.807,07**,- atau 14,26 %.

4. Surplus /Defisit LO

Surplus /Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban, selama 1 tahun periode pelaporan. setelah diperhitungkan suplus/defisit dari kegiatan surplus defisit laporan operasional 31 Desember 2022 sebesar Rp. (27.088.335.244,98),-

C. NERACA SKPD

ASET :

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran :

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar *Rp.0,-* (Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetorkan sebelum tanggal 31 Desember 2022).

b. Kas di Bendahara Penerima (*tidak ada)*
c. Piutang *(tidak ada)*
d. Penyisihan Piutang *(tidak ada)*
e. Belanja Dibayar Dimuka *(tidak ada)*
f. Persediaan sebesar Rp.0,-

Nilai Persediaan pada 31 Desember 2022 sebesar *Rp. 0,-*

2. Aset Tetap

1. Aset Tetap Tanah

Aset Tetap tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 16.449.800.000,- diperoleh dari saldo awal sebesar Rp. 17.158.100.000,- Berkurang sebesar Rp.708.300.000,- adanya hibah ke Pemerintah Pusat.
(daftar rincian lengkap terlampir)

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.785.587.553,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.854.213.453 bertambah sebesar Rp. 68.625.900,- terdiri dari :

Saldo awal sebesar	Rp. 5.785.587..553,-
Belanja modal tahun 2022 sebesar	Rp. 87.106.000 ,-
Koreksi Bertambah /berkurang	Rp. 18.480.100 ,-
Penghapusan	Rp. 0,-
Kapitalisasi	Rp. 0,-
Rusak Berat	Rp. 0,-
Penyusutan	Rp. (,5.391.269.630,56)

Saldo nilai buku atas catatan peralatan mesin Rp. 462.943.822,44

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 13.123.048.924,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.12.173.048.924 ,- berkurang sebesar Rp.**950.000.000**,- diperoleh dari:

saldo awal tahun sebesar	Rp. 13.123.048.924,-
Belanja Modal tahun 2022 sebesar	Rp. 0,-
Hibah ke pusat	Rp. 950.000.000,-
Koreksi Bertambah/berkurang	Rp. 5.213.584.554,81
Koreksi Penyusutan	Rp.(437.000.000,-)
Penghapusan	Rp. 0,-
Kapitalisasi	Rp. 0,-
Rusak Berat	Rp. 0,-
Penyususstan	Rp.(4.776.584.554,81)
Saldo nilai buku gedung dan bangunan	Rp. 7.396.464.369,19

4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 960.835.350,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.960.835.350,- diperoleh dari :

Saldo awal sebesar	Rp. 960.835.350,-	
Belanja Modal tahun 2022 sebesar		Rp. 0,-
Koreksi berkurang/bertambah		Rp.,-
Koreksi Penyusutan	Rp. **337.041.857,78,-**	
Penghapusan		Rp. 0,-
Kapitalisasi		Rp. 0,-
Rusak Berat	Rp. 0,-	
Penyusustan		Rp. (337.041.857,78)
Saldo Nilai Buku		Rp.623.793.492,22,-

5. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 162.221.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.162.221.000,-diperoleh dari :

Saldo awal tahun 2022 sebesar		Rp. 162.221.000,-
Belanja Modal tahun 2022 sebesar		Rp. ,-
Belanja Modal berkurang sebesar	Rp. ,-	
Penghapusan		Rp. 0,-
Kapitalisasi		Rp. 0,-
Rusak Berat		
Koreksi ATB	Rp. 0,-	
Penyusustan		Rp. (**26.403.400)**
Saldo Nilai Buku		Rp. 135.817.600,-

(Daftar rincian lengkap, terlampir)

6. Konstruksi dalam pekerjaan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.056.374.000 sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.056.374.000,- diperoleh dari:

Saldo awal tahun 2022 sebesar	Rp. 1.056.374.000,-

Koreksi dalam pengerjaan sebesar		Rp. 0,-
Penghapusan	Rp. 0.-	
Kapitalisasi		Rp. 0,-
Rusak Berat		Rp. 0.-
Penyusutan		Rp. 0,-
Saldo Nilai Buku		Rp. 1.056.374.000,-

3. Aset lain - lain

Aset lainnya terdiri dari :

a. Aset rusak berat per 31 desember 2021 sebesar Rp.3.654.890.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.654.890.000,-
b. Asset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp. 14.765.440- dari saldo awal sebesar Rp.76.850.800,- berkurang sebesar Rp.62.085.360,-

c. AssetTak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.200.800.000- keadaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.200.800.000,-

4. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jumlah kewajiban Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT sebesar Rp. 0,- karena tidak terdapat sisa kas dibendahara pengeluaran atau sisa kas telah disetor ke Kas Daerah atau PPKD sebelum tanggal 31 Desember 2022.

5. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah

dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 28.448.758.483,85,-

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas Awal sebesar Rp. 30.661.526.842,83,-

RK PPKD sebesar Rp. *26.096.866.886*,-

Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(28.309.635.244,98)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar, sebesar Rp.0,-

Ekuitas Akhir Tahun sebesar Rp. 28.448.758.483,85,-

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

1. Profil OPD

a. Nama dan Alamat

Nama OPD : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.1 Gedung E Lantai 1-2

Telepon : -

Kode Pos : 85118.

Email : -

Faximile : -

b. Struktur Organisasi

- Nama : Sylvia R. Peku Djawang, SP.MM.
  NIP : 19650323 199503 1 004
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
  Jabatan : Kepala Dinas

Sekretariat

- Nama : Johanis Mau, S.Sos. MM.
  NIP : 19621211 1986031 019
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Tk.I / IV.b
  Jabatan : Sekretaris Dinas

- Nama : John Jozefh Laimeheriwa, SST.
  NIP : 19670327 198903 1 010
  Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk.I (III/d)
  Jabatan : Kasubag Keuangan

- Nama : Regina Maria Nailiu.
  NIP : 19650906 199209 2 001
  Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
  Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- Nama : Felipe Lelo Bere,SE,MM
  NIP : 19730112 199510 1 002
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)
  Jabatan : Kepala Bidang

Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

- Nama : Drs. Ady Edezon Mandala, M.Si
  NIP : 19700123 199009 1 002
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
  Jabatan : Kepala Bidang

Bidang Ketenagakerjaan

- Nama : Thomas Suban Hoda, ST.
  NIP : 19700514 200012 1 006
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)
  Jabatan : Kepala Bidang

- Nama : Victor O. Adoe, SE.
  NIP : 19741109 200901 1 001
  Pangkat/Golongan/Ruang : Penata (III/c)
  Jabatan : Kasi Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial

- Nama : Ketut Supiastra, SE.
  NIP : 19711204 199403 1 004
  Pangkat/Golongan/Ruang : Penata Tingkat (III/d)
  Jabatan : Kasi Penempatan Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja

Bidang Ketransmigrasian

- Nama : Ir. I. Wayan Subratha
  NIP : 19660725 198903 1 010
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)
  Jabatan : Kepala Bidang

UPTD Latihan Kerja

- Nama : Charles B.M. Foeh, SE. M.Si.
  NIP : 19711107 199803 1 009
  Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina (IV/a)
  Jabatan : Kepala UPTD

❖ Nama : Jeremias Ata, SH.
NIP : 19740405 200012 1 007
Pangkat/Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Pelatihan dan Promosi

DASAR HUKUM RINCIAN OBYEK PENDAPATAN :

NO	RINCIAN OBYEK PENDAPATAN	DASAR HUKUM
1.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
2.	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Penyewaan Bangunan	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki empat (4) Obyek Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

   a. Pelayanan pendidikan pelatihan teknis tenaga kerja

   b. Rumah Dinas :

      Rumah Dinas Tipe B, 3 (Tiga) unit dengan retribusi per bulan sebesar *Rp.600.000,-*

      Rumah Dinas Tipe C, 10 (sepuluh) unit dengan retribusi per bulan sebesar *Rp.450.000,-*

      Rumah Dinas Tipe E, 9 (sembilan) unit dengan retribusi per bulan sebesar *Rp.150.000,-*

   c. Gedung/Ruangan/Aula/Asrama 2 (dua) unit dengan biaya pemakaian sebesar RP. *750.000,-* sekali pakai, Asrama per orang Rp.50.000,-

3. Masalah lain yang dihadapi adalah :

Kapasitas /kekuatan jaringan Internet VPN IP untuk mengoperasikan Aplikasi SIPKD yang diakses ke masing - masing OPD sangat kecil sehingga berakibat lambat pada saat proses penginputan.

Salah satu faktor yang menghambat penyerapan Realisasi Belanja sampai dengan akhir Tahun Anggaran adalah adanya refoucusing.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680512 199503 2 003